

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Jepara

Halaman 13

Proyek Dibiayai APBD Harus Selesai Akhir November

JEPARA - Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Jepara, harus sudah selesai selambat-lambatnya akhir November 2018. Hal ini disampaikan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (Rakor POK), Kegiatan APBD Tahun 2018. Rakor ini digelar di Pendopo Kartini Jepara, Selasa, (4/9), diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disampaikan bupati, prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara telah terjabarkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Di antaranya adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri pariwisata guna meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi unggulan daerah.

"Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun ini telah berjalan dengan baik dan sebagian besar sudah sesuai time schedule yang direncanakan. Namun tetap harus ada target waktu penyelesaian yang pasti," ujar Ahmad Marzuqi.

Jika proyek-proyek APBD Jepara sudah harus selesai pada akhir Nopember, maka

untuk proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Perubahan, di *deadline* sudah harus selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2018. Ditegaskan juga oleh Ahmad Marzuqi, bagi OPD yang sampai saat ini belum melaksanakan lelang diharapkan segera melaksanakan proses lelang. Mereka diminta segera melaksanakan proses lelang dengan berkoordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Selain itu setiap OPD yang mengelola APBD diharapkan melaksanakan kegiatan evaluasi internal secara komprehensif. Terutama dengan rekanan selaku mitra

kerja dinas, dengan harapan untuk menghindari kesalahan sekecil apa pun. Khusus untuk APBD Perubahan diharapkan OPD segera Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan, dan segera diajukan pengesahannya kepada bupati.

"Khusus kesalahan yang dilakukan rekanan, OPD harus berani memberi teguran baik lisan maupun tertulis sehingga mutu dan kualitas kegiatan benar-benar terjaga," tambah Ahmad Marzuqi.

Sementara Kabag Pembangunan Setda Jepara, Hery Yulianto mengatakan, rekap lelang melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik (LPSE) sampai dengan Agustus 2018, terdapat 208 paket pekerjaan dengan nilai total 239,94 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, jalan, irigasi, drainase, air bersih, talud, pemeliharaan pasar, pembangunan Puskesmas, Pasar Bangsri, Mapolres Jepara dan RSUD Kartini.

"Untuk yang dibiayai APBD Jepara 2018 sebagian besar sudah dilaksanakan dan masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan yang dibiayai APBD Perubahan 2018, saat ini terus berproses untuk segera dilelang tender," jelas Heri Yulianto.

dis/SR